

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENGENDALIAN INFLASI DAN PEMENUHAN
BARANG POKOK DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



Diajukan oleh

JELIKA NUR ARIFA

NIM 07011382126229

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024/2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGENDALIAN
INFLASI DAN PEMENUHAN BARANG POKOK
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**

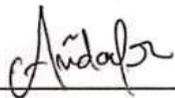
Oleh:

**JELIKA NUR ARIFA
NIM. 07011382126229**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 24 April 2025

Pembimbing

**Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016**



**Mengetahui
Ketua Jurusan**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN
INFLASI DAN PEMENUHAN BARANG POKOK DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

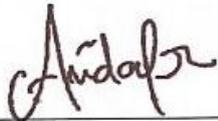
**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 16 Mei 2025
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Annada Nasyaya S.IP., M.Si

NIP. 198809062019032016

Pembimbing



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.

NIP. 197905012002121000

Penguji



Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si

NIP. 198902222023212044

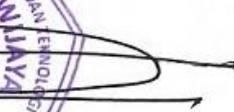
Penguji



Mengetahui,



Dekan FISIP UNRSI,
Prof. Dr. Alfritri, M. Si
NIP. 196601221990031004



Ketua Jurusan
Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jelika Nur Arifa
NIM : 07011382126229
Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Inflasi Dan Pemenuhan Barang Pokok di Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 24 April 2025


Jelika Nur Arifa
NIM. 07011382126229

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

”Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Baskara Putra)

“Jalani hidupmu seolah-olah semuanya dirancang untuk kebaikanmu.”

(Jallaludin Rumi)

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya Persembahkan Kepada:

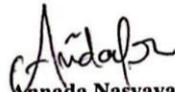
1. Kedua orang tua tercinta, terkasih dan tersayang.
2. Pimpinan, Dosen, Staf, dan seluruh Civitas Akademika FISIP UNSRI
3. Almamater Kebanggaan Universitas Sriwijaya
4. Untuk yang selalu bertanya: “kapan skripsimu selesai”

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan konsep *Collaborative Governance* dapat menjadi strategi efektif dalam pengendalian inflasi dan pemenuhan barang pokok di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* di Kota Palembang telah berjalan cukup efektif. Program-program seperti pasar murah, monitoring harga, penguatan kerjasama antar daerah, telah berkontribusi positif dalam mengendalikan inflasi. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga akibat faktor eksternal, belum optimalnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan penggunaan teknologi informasi masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya memperkuat konsistensi kolaborasi antar-stakeholder, memperluas edukasi kepada masyarakat, mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam monitoring harga, mempererat kerjasama antar daerah, serta meningkatkan evaluasi dan refleksi berkala terhadap efektivitas kolaborasi. Dengan strategi tersebut, pengendalian inflasi dan pemenuhan kebutuhan pokok di Kota Palembang diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Inflasi, Barang Pokok, Kota Palembang, Pengendalian Harga.

Pembimbing

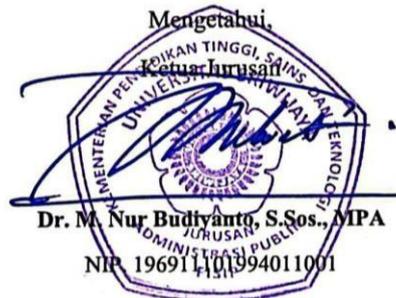


Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016

Palembang, April 2025

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

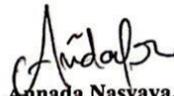
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study examines in depth how the application of the Collaborative Governance concept can be an effective strategy for controlling inflation and ensuring the availability of essential goods in Palembang City. The research employs a qualitative method, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The results indicate that the implementation of Collaborative Governance in Palembang has been relatively effective. Programs such as affordable markets, price monitoring, and strengthening inter-regional cooperation have positively contributed to inflation control. However, challenges such as price fluctuations due to external factors, suboptimal public participation, and limited use of information technology still require further attention. This study recommends strengthening the consistency of collaboration among stakeholders, expanding public education, optimizing the use of technology for price monitoring, enhancing inter-regional cooperation, and conducting regular evaluations and reflections on the effectiveness of collaboration. With these strategies, inflation control and the fulfillment of essential goods in Palembang City are expected to be more optimal and sustainable.

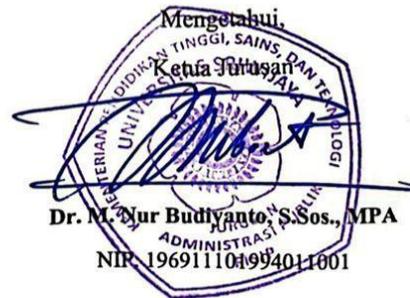
Keywords: *Collaborative Governance, Inflation, Essential Goods, Palembang City, Price Control.*

Pembimbing



Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016

Palembang, April 2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan segala puji milik Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam pengendalian inflasi dan pemenuhan barang pokok di kota Palembang”. Dimana skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban dalam melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) ilmu administrasi publik. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sehubungan dengan hal ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa, ibunda Yuliana dan ayahanda Andilala Indra, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Kepada ayah saya, terima kasih atas setiap curahan keringat dan kerja kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat menempuh pendidikan sampai ke tingkat ini terima kasih. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala doa, motivasi, pesan dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh.
2. Saudara tercinta, adik saya Ahmad Al Ghivari yang selalu memberikan dukungan untuk keberhasilan saya dan memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M. Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Prof. Dr. Alfitri, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku ketua Program studi Administrasi Publik
6. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing magang sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran serta telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis.

7. Ibu Elsa Noviani, selaku Kepala Bidang dan seluruh pegawai serta staf, terkhusus bagian stabilitas dan sarana distribusi perdagangan kota Palembang.
8. Adelia, Anisa, Syintia, selaku sahabat penulis, yang telah memberi motivasi dan semangat yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Yang tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini. Semoga kesuksesan milik kita bersama.
9. Grup hijrah (keysha, pera, affrina, ayu dan septa), selaku teman penulis, terima kasih telah menjadi inspirasi dan sumber kebahagiaan yang tidak pernah ada habisnya. Semoga kesuksesan milik kita bersama.
10. Cahya, Mita, Fathur, Angga, Welke, Della, dan Aulia, selaku teman seperjuangan dimasa skripsi ini, yang telah memberi semangat dan kegigihan yang selalu disalurkan kepada satu sama lain.
11. M zikry fahlevi, selaku partner penulis, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Last but not least, Jelika Nur Arifa, untuk diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil merupakan bagian dari perjalanan dan tujuan yang lebih besar.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, 20 april 2025



Jelika Nur Arifa

NIM. 07011382126229

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
12.1..... Latar Belakang	1
12.2..... Rumusan Masalah.....	11
12.3..... Tujuan Penelitian.....	11
12.4..... Manfaat Penelitian.....	11
12.4.1 Secara Teoritis.....	12
12.4.2 Secara Praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.2 <i>Collaborative Governance</i>	13
2.2.1 Definisi <i>Governance</i>	16
2.2.2 Model <i>Collaborative Governance</i>	17
2.2.3 Tujuan Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i>	21
2.3 Inflasi.	23
2.3.1 Definisi Inflasi.....	23
2.3.2 Pengendalian Inflasi.	23
2.4 Kerangka Berpikir.....	27
2.5 Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	32

3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Definisi Konsep.	32

IX

3.2.1 <i>Collaborative Governance</i>	33
3.2.2 Pengendalian Inflasi.	33
3.2.3 Barang Pokok.	34
3.3 Fokus Penelitian.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4.1 Data Primer.....	36
3.4.2 Data Sekunder.	36
3.5 Informan Penelitian.....	36
3.5.1 Informan Kunci (<i>Informant Key</i>)	37
3.5.2 Informan Tambahan.	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6.1 Observasi.	39
3.6.2 Wawancara	39
3.6.3 Dokumentasi.....	39
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
3.7.1 Reduksi Data.	40
3.7.2 Penyajian Data.....	40
3.7.3 Penarikan Kesimpulan.....	40
3.8 Teknik Keabsahan Data.	41
3.9 Sistematika Penulisan.	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	43
4.1.1 Keadaan Umum Kota Palembang	43
4.1.2 Dinas Perdagangan Kota Palembang.....	45
4.1.3 Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Kota Palembang	49
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.	52
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan.	53
4.3.1 Kondisi Awal (<i>Starting Conditions</i>).....	55
4.3.1.1 Kekuatan Pemangku Kepentingan yang Berbeda.....	55
4.3.1.2 Insentif yang Dimiliki Pemangku Kepentingan.	60

4.3.2 Kepemimpinan Fasilitatif (<i>Facilitative Leadership</i>)	67
4.3.3 Desain Kelembagaan.	71

4.3.3.1 Aturan Dasar yang Jelas.....	72
4.3.3.2 Transparansi Proses.	74
4.3.4 Proses Kolaboratif.	76
4.3.4.1 Dialog Tatap Muka (<i>Face to Face Dialogue</i>).....	76
4.3.4.2 Membangun Kepercayaan (<i>Trust Building</i>).....	80
4.3.4.3 Komitmen Proses (<i>Commitment to process</i>).....	84
4.3.4.4 Pemahaman Bersama (<i>Shared Understanding</i>).....	88
4.3.4.5 Hasil Sementara (<i>Intermediate Outcomes</i>).....	92
4.4 Diskusi	96
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan.	99
5.2 Saran.	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	10

DAFTAR TABEL

1. IHK dan Laju Inflasi di Kota Palembang.....	6
2. Data Inflasi dari Tahun ke Tahun di Kota Palembang	7
3. Peran Masing-masing Organisasi	10
4. Penelitian Terdahulu.....	28
5. Fokus Penelitian.....	35
6. Informan Penelitian.....	37
7. Data Informan Penelitian	53
8. Rekap Hasil Analisis Data dan Pembahasan	97

DAFTAR GAMBAR

1. Model <i>Collaboration Governance</i> Milik Ansell and Gash.....	2
2. Kerangka Pemikiran	27
3. Peta Administrasi Palembang.	44
4. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Palembang.....	48
5. Struktur Organisasi Daerah Kota Palembang.	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak terlepas dari permasalahan inflasi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warganya (Vetria, 2024.). Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai macam dampak negatif, seperti penurunan kemampuan daya beli masyarakat, ketidakstabilan ekonomi, hingga bisa mempengaruhi kesejahteraan sosial. Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumatra Selatan tidak lepas dari permasalahan inflasi, terutama dalam hal pemenuhan barang pokok di kota Palembang. Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah, termasuk di kota Palembang yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.

Inflasi adalah sebuah keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (*price level*) dan bersifat secara terus-menerus (Subekti, 2023). Memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Inflasi tidak hanya mempengaruhi harga satu barang, tetapi juga berimbas pada harga barang-barang lainnya, menciptakan rantai kenaikan harga di berbagai sektor. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penting bagi suatu negara untuk menjaga inflasi pada tingkat yang stabil dan terkendali. Jika inflasi mencapai tingkat yang terlalu tinggi, atau dikenal sebagai *hyperinflation*, nilai mata uang akan menurun drastis. Dalam kondisi ini, meskipun

pendapatan nominal masyarakat tetap, daya beli mereka akan berkurang karena harga barang dan jasa terus naik. Hal ini terutama berisiko bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan penghasilannya dengan laju inflasi. Apabila inflasi didorong oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti makanan dan energi, dampaknya akan lebih terasa, karena kebutuhan ini tidak bisa dihindari. Dalam skenario seperti itu, masyarakat dengan penghasilan rendah akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar, karena pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok akan menyerap sebagian besar pendapatan mereka, mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Kondisi ini juga dapat memperburuk ketimpangan sosial, karena kelompok masyarakat yang lebih mampu memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan harga, sementara kelompok yang lebih rentan akan semakin terpuruk. Oleh karena itu, menjaga inflasi agar tidak terlalu tinggi merupakan kebijakan penting untuk melindungi daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Karakteristik penawaran dan permintaan untuk komoditas pangan/pertanian memang unik karena keduanya cenderung bersifat inelastic terhadap perubahan harga (David, 2018). Karena merupakan kebutuhan sehari-hari, seperti beras, telur, daging, bawang, dan cabai, konsumen akan terus membelinya meskipun terjadi fluktuasi harga. Namun, sifat inelastis ini juga berarti bahwa ketika terjadi kenaikan harga, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama karena permintaan terhadap barang pokok tidak dapat dengan mudah dikurangi. Peran serta sektor pertanian dan peternakan sangat penting, karena merupakan keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan Masyarakat (Christyanto & Mayulu, 2021). Namun,

sektor-sektor ini menghadapi berbagai tantangan yang sering kali sulit diprediksi, seperti perubahan cuaca, bencana alam, serta faktor lain yang dapat menyebabkan penurunan produksi. Ketika penawaran atau produksi terganggu, sementara permintaan tetap tinggi, keseimbangan pasar terganggu, yang dapat menyebabkan kelangkaan bahan pangan. Akibat dari ketidakseimbangan ini adalah kenaikan harga barang pokok.

Fluktuasi harga barang pokok akibat ketidakstabilan pasokan dapat menimbulkan masalah yang lebih besar, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, karena bahan-bahan ini merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, stabilitas sektor pertanian dan peternakan menjadi krusial dalam menjaga harga bahan pokok agar tetap terkendali dan menghindari dampak inflasi yang merugikan daya beli Masyarakat. Terjadinya kelangkaan pasokan dan tingginya permintaan masyarakat terhadap pangan menimbulkan gejolak harga pangan yang berfluktuatif, sehingga berdampak terhadap perekonomian suatu wilayah (Hidayat, 2019). Dari sisi permintaan, harga suatu barang sangat erat kaitannya dengan perilaku konsumsi masyarakat. Konsumen cenderung mencari harga yang terjangkau dengan kualitas barang yang baik. Di sisi lain, produsen atau penjual memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan dengan menawarkan barang pada harga yang lebih tinggi. Teori permintaan dan penawaran diperlukan untuk mempelajari hubungan antara pembeli dan penjual dalam suatu pasar terutama dalam kaitannya pada pencapaian keseimbangan harga dan kuantitas atau yang disebut dengan keseimbangan pasar (*market equilibrium*) (Heertje, 1967).

Teori ini menjelaskan bahwa dalam satu pasar yang kompetitif, harga akan menjadi penyeimbang di pasaran antara kualitas yang diminta oleh konsumen dan kualitas yang ditawarkan produsen, sehingga akan terciptalah keseimbangan antara harga dan kualitas suatu barang tersebut (Aroy Maulana et al., 2021). Namun, jika terjadi ketidakseimbangan misalnya, permintaan terhadap barang relatif tetap, tetapi pasokan menurun kelangkaan komoditas akan terjadi. Dalam konteks bahan pokok, situasi ini biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti gangguan produksi di sektor pertanian atau peternakan. Kelangkaan ini secara langsung memicu kenaikan harga bahan pokok. Karena permintaan terhadap bahan pokok bersifat inelastis, masyarakat tetap akan membeli komoditas tersebut meskipun harga naik. Kondisi inilah yang sering kali memicu inflasi, di mana kenaikan harga bahan pokok mendorong kenaikan harga barang-barang lainnya di pasar. Inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga bahan pokok dapat berdampak luas, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang daya belinya berkurang secara signifikan. Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, khususnya untuk bahan pokok, sangat penting untuk memastikan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

Barang pokok atau sembako, sering mengalami fluktuasi harga di Palembang. Sembako adalah kebutuhan pokok sehari-hari yang harus dijual di pasar. Pentingnya sembako adalah karena pemerintah harus memastikan bahwa barang tersebut ada dan tidak membiarkan harga dan stok barang tersebut berubah sesuai dengan mekanisme pasar. Beberapa sumber ketidakstabilan harga ini termasuk kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah barang yang dapat diimpor dari luar negeri dan tindakan bodoh pedagang yang menimbun barang pada waktu tertentu, seperti menjelang hari

raya Idul Fitri, Natal, dan tahun baru. Dinas Perdagangan adalah salah satu lembaga yang menangani masalah pasar. Organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tingkat organisasi, upaya untuk mencapai visi dan misi organisasi berhubungan dengan manajemen kinerja. Sebagai lembaga pemerintah, Departemen Perdagangan memiliki tugas untuk menjaga harga bahan pokok stabil. Akibatnya, karena harga bahan pokok yang tidak stabil, kelangkaan bahan pokok, dan kelancaran distribusi barang dan jasa, perlu dipertanyakan bagaimana peran Departemen Perdagangan dalam menjaga harga bahan pokok stabil.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, peran dinas perdagangan masih menjadi bagian dari kebijakan pembangunan. Ini terbukti dengan fakta bahwa hingga saat ini, dinas perdagangan masih termasuk dalam program pembangunan pemerintah, termasuk pengembangan dan pelatihan UKM, salah satunya di kota Palembang. Pemerintah harus menyelidiki kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok untuk mengetahui penyebabnya. Dinas Perdagangan harus memantau harga bahan pokok untuk menghindari masalah seperti kelangkaan harga. Pemerintah juga memiliki otoritas untuk mengatur kegiatan ekonomi sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam masalah ekonomi karena sektor publik menjalankan fungsi utama yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Perkembangan inflasi dari tahun ke tahun pada 24 (dua puluh empat) kota Inflasi di Pulau Sumatera pada bulan Desember 2023, seluruh kota mengalami inflasi, kota Palembang menjadi urutan keempat dengan inflasi sebesar 3,22 persen.

**Tabel 1. IHK dan laju Inflasi di Kota Palembang dan Kota IHK lainnya di
Pulau Sumatera**

No	Kota IHK	IHK Desember 2023	Inflasi Desember 2023	Inflasi Tahun kalender	Inflasi Tahun ke tahun
1	Tanjung Pandan	119,93	-0,57	3,80	3,80
2	Bandar Lampung	118,66	0,02	3,52	3,52
3	Jambi	118,66	0,25	3,27	3,27
4	Palembang	116,53	0,15	3,22	3,22
5	Bengkulu	116,68	0,24	3,09	3,09
6	Mitro	118,60	-0,03	3,05	3,05
7	Padangsidipuan	119,05	0,21	2,95	2,95
8	Bungo	117,44	0,31	2,85	2,85
9	Batam	116,85	0,48	2,85	2,85
10	Sibolga	118,32	0,80	2,80	2,80
11	Dumai	117,85	-0,03	2,78	2,78
12	Lubuklinggau	115,97	0,25	2,61	2,61
13	Padang	117,62	0,34	2,55	2,55
14	Pekanbaru	116,88	0,21	2,50	2,50
15	Gunungsitoli	117,35	0,20	2,35	2,35
16	Pematang Siantar	117,06	0,56	2,30	2,30
17	Medan	114,84	0,60	2,19	2,19
18	Tanjung Pinang	113,31	0,17	2,14	2,14
19	Pangkal Pinang	115,94	0,26	2,01	2,01
20	Bukit Tinggi	117,02	-0,14	1,88	1,88
21	Lhokseumawe	116,75	0,12	1,56	1,56
22	Banda Aceh	116,75	0,25	1,53	1,53
23	Tembilahan	114,32	0,11	1,53	1,53
24	Meulabo	120,38	-0,67	1,42	1,42

Sumber : badan pusat statistik kota Palembang, terakhir diperbarui 2 januari 2024

Menurut Data dari badan pusat statistik (BPS),inflasi di Kota Palembang pada beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh fluktuasi harga Barang-Barang Pokok (BPS Kota Palembang, 2024).upaya untuk mengendalikan permasalahan inflasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat. Collaborative Governance atau bisa juga diartikan dengan tata kelola kolaboratif menjadi pendekatan yang tepat dalam pengendalian inflasi dan pemenuhan kebutuhan barang pokok, karena konsep ini mengedepankan kerja sama antara pemerintah, swasta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan publik.

Tabel 2. Data Inflasi dari Tahun ke Tahun di Kota Palembang

Inflasi Kota Palembang (Month To Month)									
2019		2020		2021		2022		2023	
Januari	0,140	Januari	0,620	Januari	0,430	Januari	0,940	Januari	0,350
Februari	-0,240	Februari	0,260	Februari	-0,080	Februari	-0,010	Februari	0,090
Maret	-0,010	Maret	0,040	Maret	0,170	Maret	0,700	Maret	0,210
April	0,550	April	-0,120	April	0,330	April	0,960	April	0,330
Mei	0,380	Mei	0,130	Mei	-0,020	Mei	0,810	Mei	-0,050
Juni	0,560	Juni	0,190	Juni	-0,010	Juni	0,900	Juni	0,390
Juli	0,390	Juli	-0,280	Juli	-0,060	Juli	0,760	Juli	0,290
Agustus	-0,160	Agustus	-0,350	Agustus	-0,040	Agustus	-0,850	Agustus	-0,040
September	-0,160	September	-0,050	September	0,050	September	1,280	September	0,370
Oktober	-0,090	Oktober	0,160	Oktober	0,070	Oktober	-0,100	Oktober	0,530
November	0,300	November	0,310	November	0,560	November	-0,050	November	0,550
Desember	0,390	Desember	0,580	Desember	0,420	Desember	0,470	Desember	0,150

Sumber : *Badan pusat statistik Sumatera Selatan, Terakhir Diperbarui 5 Juni 2024*

Berdasarkan data di atas, data inflasi Kota Palembang menunjukkan fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023 dengan pola unik setiap bulannya. Inflasi cenderung meningkat di awal tahun, terutama pada Januari, yang mencapai puncaknya pada

2022 (0,940%), sebelum turun menjadi 0,350% di 2023. Deflasi terlihat di beberapa bulan seperti Februari 2019 (-0,240%) dan Oktober 2022 (-0,100%), sementara bulan Desember secara konsisten mencatat inflasi positif, dengan angka tertinggi di 2023 (0,550%). Secara keseluruhan, inflasi mencapai puncaknya pada 2022, sedangkan 2023 menunjukkan penurunan yang lebih stabil, mencerminkan potensi perbaikan pengendalian harga atau pola konsumsi masyarakat. Untuk pengendalian inflasi yang lebih stabil, Pemerintah Kota Palembang perlu memperkuat koordinasi antar-lembaga, menjaga distribusi logistik, dan memastikan ketersediaan barang pokok, terutama pada periode konsumsi tinggi.

Collaborative Governance menurut *ansell and gash* merupakan suatu kegiatan kolaborasi atau kerjasama dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan suatu pihak lain yang ikut terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan yang sama, untuk menyelesaikan suatu masalah, melalui empat tahapan proses yaitu, yang meliputi kondisi awal, pola desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

Menurut Agrawal dan Lemos bahwa definisi *Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "*multipartner governance*" yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat dan privat-sosial (Agustina, 2018). Adapun pendapat lain yang dikemukakan Menurut Gray dalam Haryono, (2012: 48) Kolaborasi dimaknai sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang

berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis Masyarakat(Tongkotow et al, 2021). Konsep *Collaborative Governance* memungkinkan untuk beradaptasi dengan masalah yang mengharuskan berbagai pihak atau instansi untuk memecahkan masalah yang sama. Selain itu, menurut Robertson dan Choi (2010) (dalam Kumorotomo, 2013:10) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut(Rivelino & Ginting, 2020). Dari masalah yang telah diuraikan di atas, penulis ingin membahas konsep kerja sama pemerintahan dalam pengendalian inflasi dan pemenuhan barang pokok yang dibangun oleh dinas perdagangan kota Palembang, yang memasukkan proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa sektor publik, sesuai dengan pernyataan *Ansell and Gaash*.

Collaborative Governance ini juga merupakan solusi alternatif yang paling efektif dan memungkinkan bagi lembaga pemerintahan dalam mengatasi permasalahan yang kompleks (Dewi dan Yuniningsih 2019)(dalam Pebriani & Nasyaya, 2023). *Collaborative Governance* merupakan model baru dari *Governance* yang hadir sebagai strategi baru menggantikan berbagai model pengambilan kebijakan dan implementasi terdahulu. Model ini melibatkan peran dari banyaknya pihak dalam prosesnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kolaborasi dari berbagai pihak baik dari pihak pemerintah maupun swasta agar terciptanya konsensus dalam pengambilan suatu keputusan (*Ansell and Gash, 2008*). Desain kelembagaan menetapkan aturan dasar yang jelas dan transparansi prosesnya. Dan,

kepemimpinan fasilitatif dalam model *Ansell and Gash* yang menyediakan fasilitas penting dalam proses kolaboratif. Proses kolaboratif dalam *model Ansell and Gash* dilakukan secara berulang dan digambarkan menjadi sebuah siklus, mulai dari dialog tatap muka yang berhubungan dengan membangun kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh pada komitmen dalam proses kolaborasi (*Ansell and Gash, 2008*). Dimana nantinya komitmen yang ada akan menjadi pemahaman bersama dalam perumusan masalah yang mengidentifikasi misi yang jelas sehingga dapat menghasilkan rencana strategis dalam menjalankan kolaborasi (*Ansell and Gash, 2008*).

Tabel 3. Peran Masing-Masing Organisasi

Instansi	Peran	
	Pencegahan	Penanganan
Dinas perdagangan Kota Palembang	Menjaga stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok	Melakukan mentoring harga untuk memantau jika ada terjadinya kenaikan harga yang tidak wajar.
Bank sumselbabel	Menyediakan fasilitas untuk mendukung usaha kecil dan menengah dalam menjaga kestabilan ekonomi	Mengalokasikan dana Bantuan untuk menstabilkan Harga kebutuhan pokok Jika terjadi lonjakan yang signifikan
Tim pengendalian Inflasi daerah	Mengawasi pola distribusi barang untuk memastikan Ketersediaan bahan pokok	Melakukan koordinasi lintas Sektor untuk mengatasi Kelangkaan bahan pokok Atau kenaikan harga yang Tidak wajar.
Pasar murah	Menggelar pasar murah Secara berkala untuk Memberikan akses bahan Pokok dengan harga Terjangkau kepada Masyarakat	Memperluas cakupan pasar Murah di wilayah yang Terdampak kenaikan harga.

Sumber : olahan dari peneliti tahun 2025

Penelitian ini berfokus pada pendekatan *Collaborative Governance* dengan menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kota Palembang. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menyoroti dampak inflasi pada daya beli dan kebijakan makro, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada peran pemerintah daerah, stabilitas pasokan bahan pokok, serta dinamika lokal. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, menjadikannya lebih kontekstual dan aplikatif untuk wilayah Palembang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat maka terciptalah rumusan masalah, yang akan dibahas, seperti berikut: “ Bagaimana Penerapan *Collaborative Governance* Dalam Mengatasi Inflasi Dan Pemenuhan Barang Pokok Kota Palembang? ”.

1.3. Tujuan Penelitian

Dapat dilihat dari Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu, untuk dapat Mengetahui Penerapan *Collaborative Governance* Dalam Mengatasi Inflasi Dan Pemenuhan Barang Pokok Di Kota Palembang

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dirumuskan maka dari itu peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat dilihat dari segi teoritis dan segi praktis yaitu:

1.4.1. Secara Teoris

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi civitas akademika jurusan administrasi publik untuk mengembangkan teori penerapan *Collaborative Governance* serta hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran dan referensi yang bermanfaat dalam melakukan penelitian serupa.

1.4.2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan atau referensi bagi suatu instansi khususnya dinas perdagangan kota Palembang terhadap bagaimana penerapan dalam menciptakan stabilitas ekonomi melalui konsep *Collaborative Governance*

DAFTAR PUSTAKA

- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Aroy Maulana, Fahriansah, & Nanda Safarida. (2021). Analisis Tingkat Elastisitas Permintaan dan Penawaran Ayam Potong Di Pasar Kota Langsa. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 173–198. <https://doi.org/10.32505/jim.v3i2.3482>
- Arieputera, A., & Setyanto, Y. (2024). Mengedukasi Masyarakat Manfaat Investasi pada Logam Mulia Secara Online sebagai Humas. *Kiwari*, 3(2), 257–263. <https://doi.org/10.24912/ki.v3i2.30175>
- Agustina, D. (2017). Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 87-103.
- Balaka, M. Y. (2022). Metode penelitian Kuantitatif. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, 1, 130.
- BPS Kota Palembang. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2023. 04. <https://sukabumikota.bps.go.id/pressrelease/2024/03/15/859/pertumbuhan-ekonomikota-sukabumi-tahun-2023.html>
- Christyanto, M., & Mayulu, H. (2021). Pentingnya pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani wilayah perbatasan dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional: Studi kasus di wilayah perbatasan Kalimantan. *Journal of Tropical AgriFood*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.35941/jtaf.3.1.2021.5041.1-14>
- Dan, S. P. (1999). Inflasi Di Indonesia : 1(1), 54–67.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200-210.

- Front Matter. (2018). *Global Governance*, 24(1). <http://www.jstor.org/stable/44861165>
- Heertje, A. (1967). *Oligopolie. De Economist*, 115(5), 611, 635 <https://doi.org/10.1007/BF02182492>
- Hidayat, A. (2019). *Jurnal Ekonomi Pertanian Sumberdaya dan Lingkungan (Journal of Agriculture , Resource , and Environmental Economics) Model Pembatasan Ukuran Rajungan*. 2, 54–66.
- Nurul Inayah. (2022). *Teori Inflasi: Studi Komparasi Pemikiran Al-Maqrizi (766-845 H/ 1364- 1442M) Dan Keynes (1883–1946)*. Mumtaz: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i01.534>
- Padang, V. S. (2016). *EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA di KABUPATEN TANA TORAJA*. 115.
- Pebriani, H., & Nasyaya, A. (2023). *Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu*. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 137-148.
- Pratiwi, V. (2019). *Analisis Kompetensi Pedagogik Dosen Pengampu Mata Kuliah Dalam Implementasi Computer Assisted Instruction (CAI)*. *Education Journal : Journal Educational Research and Development*, 3(2), 163–172. <https://doi.org/10.31537/ej.v3i2.209>
- Ratner, 2012:5. (2012). *Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12. <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita->
- Rivelino, R., & Ginting, A. H. (2020). *Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid-19 Dki Jakarta*. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 36-51.

- Ruhansih, D. S. (2017). EFEKTIVITAS STRATEGI BIMBINGAN TEISTIK UNTUK PENGEMBANGAN RELIGIUSITAS REMAJA (Penelitian Kuasi Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015). *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Sab, M. C., Kappi, M., & Ahmed, K. M. (2021). Scientometric analysis of pharmacognosy magazine: A decade of quality publishing. *Pharmacognosy Magazine*, 17(75).
- Subekti, A. T. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 7(2), 1750-1763.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Tongkotow, N. F., Waworundeng, W., & Kimbal, A. (2021). Collaborative Goverannace Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–11.
- Utami, F. (2024). Arsitektur dan Keseimbangan Ekosistem: Membangun Lingkungan yang Berkelanjutan secara Ekologis. *WriteBox*, 1(3).
- Vetria, S. (2023). Optimalisasi Peran Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Kota Palembang dalam Penanggulangan Inflasi di Kota Palembang. *Journal of Mandalika Social Science*, 1(1), 43-52.